

Analisis Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Studi Kelayakan Bisnis: Mitigasi Risiko Makro dan Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan

Janika Putri¹, Nur Fadilah Zahwa, Tirta Agrawira Chaniago, Hendra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran, signifikansi, dan implementasi aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam tahapan penyusunan Studi Kelayakan Bisnis (SKB). Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, kajian ini membedah elemen-elemen makroeksternal yang sering kali luput dari perhatian perencana bisnis, mulai dari kontribusi terhadap pendapatan nasional, mitigasi benturan sosial budaya, hingga kemampuan membaca arah kebijakan politik pemerintah. Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa kelayakan internal berupa keunggulan teknis dan finansial tidak akan menjamin kelangsungan hidup suatu proyek apabila entitas tersebut ditolak oleh masyarakat sekitar (kehilangan social license to operate) atau terjebak dalam perubahan rezim regulasi politik yang merugikan. Aspek ekonomi dan sosial mengukur seberapa besar manfaat eksternalitas positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, sementara aspek politik berfungsi sebagai radar pelindung dari ketidakpastian kebijakan makro. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa validasi terhadap ketiga aspek ini merupakan prasyarat mutlak bagi para investor guna menghindari penolakan publik, memitigasi risiko regulasi, dan memastikan bahwa investasi yang ditanamkan tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi laba, tetapi juga mendukung kemakmuran masyarakat dan stabilitas negara.

Kata Kunci: Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Politik, Studi Kelayakan Bisnis, Risiko Eksternal.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the role, significance, and implementation of economic, social, and political aspects in the preparation stages of a Business Feasibility Study (SKB). Using a descriptive qualitative method with a literature study approach, this research dissects macro-external elements that are often overlooked by business planners, ranging from contributions to national income, mitigation of socio-cultural clashes, to the ability to read the direction of government political policies. The results demonstrate that internal feasibility in the form of technical and financial superiority will not guarantee the survival of a project if the entity is rejected by the surrounding community (losing its social license to operate) or trapped in detrimental changes in the political regulatory regime. The

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, putrijanika24@gmail.com

economic and social aspects measure how much positive externality benefits the company provides to society, while the political aspect serves as a protective radar against macroeconomic policy uncertainty. The conclusion of this study confirms that the validation of these three aspects is an absolute prerequisite for investors to avoid public rejection, mitigate regulatory risks, and ensure that the investments made are not only oriented towards profit maximization but also support community prosperity and state stability.

Keywords: Economic Aspect, Social Aspect, Political Aspect, Business Feasibility Study, External Risk.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus ilmu manajemen investasi kontemporer, eksistensi sebuah entitas bisnis tidak pernah berdiri di ruang hampa. Perusahaan senantiasa hidup dan berinteraksi dengan ekosistem makro yang mengelilinginya. Oleh karena itu, penyusunan Studi Kelayakan Bisnis (SKB) tidak boleh hanya memusatkan fokus pengamatannya pada variabel-variabel internal mikrokosmos perusahaan, seperti analisis arus kas pada aspek keuangan atau kecanggihan mesin pada aspek teknis. Sehebat apa pun proyeksi profitabilitas sebuah proyek di atas kertas neraca, proyek tersebut akan seketika lumpuh apabila dihadapkan pada boikot massal dari warga sekitar, hantaman krisis resesi ekonomi nasional, atau pencabutan izin akibat transisi kebijakan rezim politik yang baru (Kasmir, 2022).

Untuk mengamankan investasi dari ancaman turbulensi lingkungan makro tersebut, para analis kelayakan bisnis diwajibkan untuk membedah rencana proyek melalui kacamata Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik. Ketiga aspek ini saling beririsan dan membentuk fondasi ketahanan eksternal perusahaan. Evaluasi pada aspek ekonomi tidak bertujuan untuk menghitung laba masuk bagi pemegang saham, melainkan menghitung apa kontribusi perusahaan terhadap kemakmuran negara, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, sumbangsih pajak, dan penghematan devisa. Aspek ini menjawab pertanyaan krusial dari pemerintah daerah: mengapa kami harus mengizinkan bisnis Anda berdiri di wilayah kami? (Suliyanto, 2023).

Bersamaan dengan itu, dimensi sosial menyoroti dampak keberadaan proyek terhadap tatanan budaya, norma, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Realitas empiris memperlihatkan banyak proyek raksasa, seperti pembangunan pabrik semen atau pembukaan lahan perkebunan, yang terpaksa dihentikan operasinya secara paksa karena gagal merangkul aspirasi masyarakat adat setempat. Fenomena ini membuktikan bahwa persetujuan dari masyarakat (social license to operate) jauh lebih kuat dan mengikat daripada sekadar izin formal dari birokrasi pemerintahan.

Perencanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang dikaji sejak fase studi kelayakan merupakan instrumen wajib untuk mencegah friksi komunal ini (Lestari, 2022).

Di kutub yang lain, stabilitas operasional jangka panjang sangat didikte oleh arah angin politik. Perubahan undang-undang ketenagakerjaan, regulasi pembatasan impor bahan baku, hingga konstelasi geopolitik internasional yang memicu perang dagang adalah variabel politik yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, namun dampaknya mampu menghancurkan rantai pasok seketika. Analisis kelayakan bisnis dituntut untuk memiliki ketajaman visi helikopter (helicopter view) dalam memproyeksikan skenario kebijakan pemerintah di masa depan agar investasi yang dikucurkan tidak tersandera oleh kebijakan yang merugikan (Fahmi, 2024).

Berangkat dari kompleksitas dan krusialnya urgensi ketiga dimensi eksternal tersebut, penelitian ini disusun untuk mengupas tuntas analisis Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam kerangka Studi Kelayakan Bisnis. Kajian deskriptif analitis ini akan mengeksplorasi variabel-variabel makroekonomi, strategi mitigasi konflik sosial, hingga taktik navigasi di tengah ketidakpastian iklim politik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun sebuah kerangka pemahaman yang komprehensif bagi para perencana bisnis, akademisi, dan investor mengenai bagaimana mengorkestrasikan kepentingan perusahaan agar selaras dengan kepentingan negara dan masyarakat, sehingga bisnis dapat bertumbuh secara berkelanjutan tanpa resistensi lingkungan.

KAJIAN TEORI

Aspek Ekonomi dalam Studi Kelayakan Bisnis

Aspek ekonomi dalam Studi Kelayakan Bisnis berfokus pada penilaian sejauh mana proyek investasi yang akan didirikan mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi makroekonomi wilayah setempat maupun nasional. Kajian ini sangat penting terutama bagi proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan fasilitas dari negara atau pinjaman dari bank-bank pembangunan. Indikator kelayakan ekonomi diukur dari beberapa parameter, di antaranya adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja baru yang menekan angka pengangguran, pemerataan distribusi pendapatan, serta kemampuan perusahaan dalam membina industri kecil menengah (UMKM) melalui kemitraan rantai pasok (Darmawan, 2024).

Selain itu, kelayakan ekonomi juga ditinjau dari kemampuannya menghasilkan atau menghemat devisa negara. Jika proyek tersebut

berorientasi ekspor, maka ia dinilai sangat layak karena menyumbang devisa. Jika proyek memproduksi barang substitusi impor yang selama ini didatangkan dari luar negeri, ia juga dinilai layak karena menghemat cadangan devisa nasional. Pada intinya, analisis ekonomi memastikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dieksploitasi oleh perusahaan memberikan timbal balik yang setimpal bagi kemajuan negara, bukan malah memiskinkan warga sekitar (Subagyo, 2022).

Aspek Sosial dan Budaya

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam tatanan norma dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Hadirnya sebuah entitas bisnis baru di suatu daerah, apalagi yang mendatangkan banyak tenaga kerja asing atau dari luar daerah, pasti akan membawa perubahan (social change) dan pergeseran nilai budaya. Aspek sosial mengevaluasi potensi pergeseran tersebut. Kelayakan sosial diukur dari seberapa mampu perusahaan membaur, menghormati kearifan lokal, dan tidak menciptakan kecemburuan sosial. Kajian ini mewajibkan perusahaan merumuskan cetak biru program pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas umum, dan pendidikan yang akan diberikan sebagai bentuk kompensasi atas ruang yang mereka tempati (Cahyono, 2023).

Aspek Politik dan Kebijakan Makro

Aspek politik berkaitan erat dengan analisis risiko terhadap perubahan kondisi perpolitikan, arah kebijakan rezim pemerintahan, serta iklim regulasi hukum ekonomi. Politik menentukan arah kebijakan pajak, subsidi, tarif impor, hingga regulasi upah minimum tenaga kerja. Suatu bisnis yang hari ini dinilai sangat layak secara finansial, bisa tiba-tiba hancur tahun depan jika pemerintah menerbitkan undang-undang pelarangan ekspor bahan mentah yang menjadi produk utama perusahaan. Oleh karena itu, analisis kelayakan harus memasukkan variabel country risk (risiko negara) dan political risk (risiko politik) untuk mengevaluasi apakah iklim investasi di negara atau daerah tersebut cukup stabil untuk menjamin kelangsungan hidup modal yang ditanamkan dalam jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan (Umar, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikonstruksi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berpijak teguh pada studi kepustakaan (library research). Desain metodologi ini berfokus pada pembedahan teori, telaah konseptual, dan analisis strategi mitigasi risiko makro dalam kerangka evaluasi Studi Kelayakan Bisnis. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui penelusuran secara sistematis terhadap berbagai literatur otoritatif, yang meliputi buku teks ekonomi makro,

sosiologi ekonomi, manajemen risiko politik korporasi, serta publikasi riset akademik terbitan lima tahun terakhir (2021-2026). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode reduksi informasi, diklasifikasikan secara tematik ke dalam klaster ekonomi, sosial, dan politik, kemudian disintesis secara induktif untuk merumuskan konklusi yang tajam, objektif, dan aplikatif bagi kepentingan perencanaan investasi lintas sektoral di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelayakan Ekonomi: Penciptaan Nilai Eksternal

Hasil telaah literatur menegaskan bahwa analisis aspek ekonomi bertindak sebagai justifikasi etis bagi sebuah proyek investasi di mata pemerintah. Dalam membedah kelayakan ekonomi, perencanaan bisnis tidak lagi berbicara tentang Return on Investment (ROI) bagi pemegang saham, melainkan berbicara tentang "multiplier effect" (efek pengganda) ekonomi. Kehadiran sebuah pabrik manufaktur di daerah pinggiran dinilai layak secara ekonomi jika pabrik tersebut memicu lahirnya ekosistem bisnis turunan di sekitarnya. Ribuan karyawan yang bekerja di pabrik tersebut akan membutuhkan kos-kosan, warung makan, transportasi lokal, dan minimarket. Efek domino yang menghidupkan roda ekonomi rakyat inilah yang menjadi nilai jual utama perusahaan saat mengajukan keringanan pajak (tax holiday) atau izin lahan kepada pemerintah daerah (Gunawan, 2022).

Analisis kelayakan juga harus menghitung dan membuktikan besaran kontribusi fiskal perusahaan kepada negara. Pajak Penghasilan (PPh) badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga bea cukai adalah aliran dana segar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika sebuah proyek dikalkulasikan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal tanpa kualifikasi pendidikan tinggi (unskilled labor) dan mengubah mereka menjadi tenaga kerja terampil yang mandiri secara finansial, maka proyek tersebut telah membantu negara menuntaskan beban kemiskinan struktural. Kelayakan ekonomi membuktikan bahwa perusahaan bukanlah parasit yang hanya menyedot kekayaan bumi nusantara, melainkan mitra strategis negara dalam memajukan kesejahteraan umum (Afiyah, 2021).

Dinamika Aspek Sosial: Meraih Persetujuan Publik (Social License to Operate)

Implementasi proyek investasi di lapangan paling sering tersandung oleh ketidaksiapan manajemen dalam menangani aspek sosial. Perusahaan yang berdiri dengan pongah dan menutup diri dengan tembok tinggi dari permukiman kumuh di sekitarnya akan segera menjadi sasaran kebencian

kolektif. Evaluasi aspek sosial dalam studi kelayakan mewajibkan manajemen untuk memetakan demografi penduduk sekitar, tingkat pendidikan mereka, serta struktur tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh (opinion leaders) di wilayah tersebut. Sosialisasi proyek sejak fase perencanaan awal harus dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan aparat desa secara transparan untuk mencegah munculnya provokasi dan kecurigaan massa (Zubaedi, 2023).

Selain itu, dokumen kelayakan bisnis harus merumuskan strategi pencegahan gegar budaya (culture shock). Masuknya tenaga kerja ahli dari perkotaan dengan gaya hidup bebas ke wilayah pedesaan yang konservatif rentan memicu gesekan etika. Perusahaan dinilai layak secara sosial apabila mereka menyusun pedoman tata tertib karyawan yang menghormati norma kearifan lokal. Lebih dari itu, komitmen alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) harus disahkan sejak dokumen SKB dibuat. CSR tidak boleh lagi dirancang sekadar sebagai aksi karikatif (pembagian sembako sesaat), melainkan harus difokuskan pada pemberdayaan kapasitas masyarakat (capacity building), seperti beasiswa pendidikan bagi anak desa sekitar dan pelatihan kewirausahaan. Hanya dengan memberikan kontribusi nyata inilah perusahaan akan dianggap sebagai tetangga yang baik dan dibela oleh masyarakat saat menghadapi krisis (Prasetyo, 2024).

Navigasi Aspek Politik dan Ketidakpastian Regulasi

Analisis aspek politik memposisikan dirinya sebagai radar pendeteksi badai regulasi di masa depan. Kelayakan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh tingkat stabilitas politik (political stability) suatu negara. Investor asing akan sangat enggan menanamkan modal miliaran dolar di wilayah yang rawan kudeta militer, konflik separatist bersenjata, atau kerusuhan sipil pasca-pemilihan umum. Namun, dalam konteks negara demokrasi yang stabil sekalipun, risiko politik tetap mengintai dalam wujud inkonsistensi kebijakan (policy inconsistency). Sebuah peraturan menteri bisa saja dibatalkan dan direvisi total dalam kurun waktu satu tahun, membuat rancangan anggaran operasional perusahaan menjadi hancur berantakan (Hakim, 2023).

Oleh karena itu, analisis kelayakan bisnis dituntut untuk memahami arah angin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Jika bisnis yang akan dibangun adalah kendaraan berbasis energi bahan bakar fosil sementara visi politik negara sedang bertransisi menuju kendaraan listrik hijau (green economy), maka secara politis kelayakan proyek tersebut sangat diragukan dalam jangka panjang karena cepat atau lambat pemerintah akan mencabut subsidi BBM atau mengenakan pajak karbon yang sangat tinggi. Sebaliknya, bisnis pengolahan limbah atau energi terbarukan akan dinilai sangat layak karena sejalan dengan narasi politik global dan domestik, sehingga berpeluang

besar mendapatkan kucuran insentif dan kemudahan birokrasi (Nugroho, 2023).

Implikasi Ketiga Aspek Terhadap Pertahanan Bisnis

Sintesis dari ketiga aspek makro ini menegaskan bahwa pertahanan terkuat sebuah perusahaan tidak dibentuk oleh seberapa tebal cadangan kas di rekening mereka, melainkan oleh seberapa kuat akar legitimasi mereka di mata masyarakat dan pemerintah. Pengabaian terhadap kelayakan ekonomi, sosial, dan politik akan melahirkan entitas bisnis yang rapuh. Sebagai ilustrasi, ketika terjadi gejolak demonstrasi tuntutan kenaikan upah berskala nasional (risiko politik), sebuah perusahaan yang memiliki hubungan buruk dengan masyarakat sekitarnya (risiko sosial) akan dengan mudah menjadi sasaran anarkisme pembakaran pabrik. Namun, perusahaan yang selama ini melindungi UMKM sekitar (risiko ekonomi) dan secara rutin memperbaiki infrastruktur desa (risiko sosial) akan dilindungi secara sukarela oleh warga setempat dari ancaman oknum perusuh eksternal (Effendi, 2025).

Dalam konstelasi ini, Studi Kelayakan Bisnis mengambil peran perintis yang memastikan manajemen perusahaan telah membangun peta jalan mitigasi sebelum mereka meletakkan batu pertama pembangunan proyek. Evaluasi yang objektif terhadap ketiga aspek eksternal ini bukan sekadar pemanis laporan untuk memenuhi persyaratan kredit bank, melainkan sebuah instrumen evaluasi diri yang radikal. Ia memaksa pengusaha untuk merendahkan egonya, mengakui keterbatasan kuasa modal, dan belajar menyelaraskan ritme bisnisnya dengan irama napas kehidupan masyarakat serta dinamika suhu politik bangsa tempat mereka mencari penghidupan (Maulana, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan analisis kualitatif deskriptif yang telah dibentangkan secara rinci, penelitian ini menyimpulkan bahwa Aspek Ekonomi, Sosial, dan Politik memegang kedudukan supremasi sebagai pilar makro yang mendikte kelangsungan hidup sejati dari sebuah proyek investasi. Sehebat apa pun racikan kelayakan finansial, pasar, dan teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, seluruhnya dapat musnah seketika apabila bisnis tersebut melahirkan inefisiensi kerugian bagi devisa negara (ekonomi), memicu konflik budaya dan penolakan warga sekitar (sosial), atau bertabrakan dengan arah kebijakan regulasi penguasa (politik). Evaluasi terhadap ketiga aspek ini membuktikan bahwa kelayakan bisnis di era modern tidak dapat lagi diukur semata-mata dari besaran akumulasi modal kapitalis, melainkan harus diukur dari kemampuannya memberikan kemanfaatan eksternalitas positif ("multiplier effect"), merawat keseimbangan tatanan kearifan lokal ("social license to operate"), serta

menavigasi turbulensi perubahan rezim dengan visi strategis yang adaptif. Kesimpulan akhir dari studi ini mensyaratkan bahwa analisis kelayakan makroeksternal ini adalah prasyarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan demi menjamin investasi yang aman, berkelanjutan, dan memberikan keberkahan kesejahteraan bagi peradaban masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, A. (2021). Evaluasi proyek dan studi kelayakan bisnis: Panduan komprehensif investasi. Pustaka Aksara.

Cahyono, E. (2023). Analisis dampak lingkungan dan sosial dalam kelayakan proyek. Bumi Aksara.

Darmawan, R. (2024). Pengantar studi kelayakan investasi dan perencanaan strategis makroekonomi. Rajawali Pers.

Effendi, M. (2025). Ekonomi politik pembangunan dan analisis risiko korporasi. Salemba Empat.

Fahmi, I. (2024). Studi kelayakan bisnis dan keputusan investasi: Teori dan aplikasi manajemen. Alfabeta.

Gunawan, H. (2022). Manajemen proyek, pra-studi kelayakan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Andi Offset.

Hakim, L. (2023). Evaluasi kinerja keuangan dan analisis risiko politik korporasi. Pustaka Pelajar.

Irawan, B. (2024). Hukum bisnis kontemporer, kebijakan publik, dan studi kelayakan. Erlangga.

Kasmir, K. (2022). Studi kelayakan bisnis: Pendekatan praktis dan teoritis (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Lestari, P. (2022). Sosiologi ekonomi: Dinamika sosial masyarakat dan investasi korporasi. Kencana.

Maulana, Y. (2026). Kriteria penilaian investasi makro dan resolusi konflik sosial. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, T. (2023). Aspek strategis ekonomi politik dalam studi kelayakan manufaktur. Graha Ilmu.

Prasetyo, W. (2024). Analisis keekonomian proyek, CSR, dan mitigasi kebangkrutan sosial. Pustaka Binaman Pressindo.

Subagyo, A. (2022). Studi kelayakan bisnis: Teori makroekonomi, regulasi, dan implementasi proyek. PT Elex Media Komputindo.

Suliyanto, S. (2023). Studi kelayakan bisnis: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif manajemen investasi. Andi Offset.

Tjiptono, F. (2021). Strategi manajemen keberlanjutan dan etika bisnis korporat. Andi Offset.

Umar, H. (2021). Studi kelayakan bisnis: Teknik menganalisis kelayakan rencana bisnis secara komprehensif. Gramedia Pustaka Utama.

Zubaedi, Z. (2023). Desain evaluasi proyek, mitigasi risiko politik, dan pemberdayaan masyarakat. Kencana.